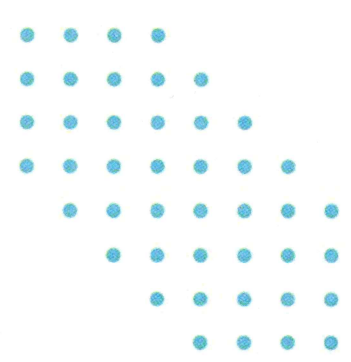



PT Bank Perekonomian Rakyat
Artha Sarana Abadi
(dahulu PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari)
Laporan Keuangan
31 Desember 2025
dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
serta
Laporan Auditor Independen



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Halaman

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7



BANK ASA

PT. BPR ARTHA SARANA ABADI

Jl. A. Yani Ruko Sentraniaga Kalimalang Blok A1 No. 3A-5
& B2 No. 8 Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17144
Telp. (021) 88962114, Email : bankasapusat@gmail.com
Website : <https://myasa.co.id>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Soebroto Gondo |
| Alamat Kantor | : | Ruko Sentraniaga Kalimalang
Jl. A. Yani Ruko Sentraniaga Kalimalang Blok A1 No. 3A-5 dan Blok B2 No. 8 Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17144 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi.
2. Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Februari 2026



Soebroto Gondo
Direktur Utama



No. : 00021/2.0923/AU.8/07/1531-1/1/II/2026

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Artha Sarana Abadi (dahulu PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari)
Bekasi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Artha Sarana Abadi ("BPR"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat (SAK Indonesia untuk Entitas Privat).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Sarana Abadi (dahulu PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporan 00023/2.0570/AU.2/07/1371-2/1/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat (SAK Indonesia untuk Entitas Privat), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

24 Februari 2026



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
Kas	4	361.234.700	402.863.300
Pendapatan bunga yang akan diterima	5	4.271.352.593	861.751.846
Penempatan pada bank lain :	3c,3e,6		
Pihak berelasi		2.250.000.000	-
Pihak ketiga		70.245.297.385	18.955.812.764
Jumlah penempatan pada bank lain		72.495.297.385	18.955.812.764
Cadangan kerugian penurunan nilai		(177.840.054)	(14.093.894)
Bersih		72.317.457.331	18.941.718.870
Kredit yang diberikan	3e,7		
Jumlah kredit yang diberikan		127.364.061.300	58.478.795.620
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.270.686.857)	(397.036.125)
Jumlah		126.093.374.442	58.081.759.495
Agunan yang diambil alih	3g,8	3.331.188.138	1.642.465.115
Aset tetap - bersih	3h,9	3.337.323.505	1.324.855.449
Aset tidak berwujud	3h,10	-	-
Aset pajak tangguhan	3m,17d	80.235.029	-
Aset lain-lain	11	5.267.968.724	1.429.495.811
JUMLAH ASET		215.060.134.462	82.684.909.886

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

LIABILITAS DAN EKUITAS

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
Liabilitas			
Liabilitas segera	21,12	958.682.257	573.491.222
Utang bunga	13	323.614.356	148.161.387
Utang pajak	3n,17b	771.735.695	195.218.036
Simpanan	3j,14	156.159.204.210	65.645.392.751
Simpanan dari bank lain	15	3.750.000.000	1.000.000.000
Pinjaman yang diterima	16	36.279.898.596	2.146.685.495
Liabilitas imbalan kerja	2m,19	729.409.351	605.917.594
Liabilitas lain-lain	18	422.600.000	3.712.853
Jumlah liabilitas		199.395.144.464	70.318.579.338
EKUITAS			
Modal saham			
Modal disetor	20	10.000.000.000	10.000.000.000
Cadangan		1.200.000.000	1.200.000.000
Saldo laba		4.464.989.998	1.166.330.548
Jumlah ekuitas		15.664.989.998	12.366.330.548
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		215.060.134.462	82.684.909.886

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :	3k,21		
Bunga		23.338.759.284	8.320.107.309
Provisi dan komisi		1.768.095.510	830.849.558
Jumlah pendapatan bunga		25.106.854.794	9.150.956.867
Beban bunga	3k,22	(8.446.213.768)	(3.489.450.256)
Pendapatan bunga, bersih		16.660.641.026	5.661.506.611
Pendapatan operasional lainnya	23	819.560.189	644.878.824
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian dan penyusutan	24	(1.739.800.133)	(535.904.588)
Tenaga kerja	25	(9.042.545.507)	(3.167.775.403)
Administrasi dan umum	26	(2.709.775.855)	(1.231.535.127)
Jumlah beban operasional		(13.492.121.495)	(4.935.215.117)
Laba operasional		3.988.079.720	1.371.170.318
Pendapatan non operasional lainnya	27	499.620.488	96.847.807
Beban non operasional lainnya	27	(166.746.025)	(86.570.538)
Laba sebelum pajak penghasilan		4.320.954.183	1.381.447.587
Pajak Kini	17a	(849.758.512)	(215.658.782)
Penghasilan (beban) pajak tangguhan	17c	80.235.029	-
Laba setelah pajak		3.551.430.700	1.165.788.805
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Laba komprehensif		3.551.430.700	1.165.788.805

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2025

	Modal saham	Saldo laba		Jumlah
		Cadangan	Saldo laba	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	6.000.000.000	1.200.000.000	541.743	7.200.541.743
Tambahan modal disetor	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
Laba bersih	-	-	1.165.788.805	1.165.788.805
Saldo per 31 Desember 2024	10.000.000.000	1.200.000.000	1.166.330.548	12.366.330.548
Jasa produksi (bonus)	-	-	(252.771.250)	(252.771.250)
Laba bersih	-	-	3.551.430.700	3.551.430.700
Saldo per 31 Desember 2025	10.000.000.000	1.200.000.000	4.464.989.998	15.664.989.998

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	23.338.759.284	8.320.107.309
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	1.768.095.510	830.849.558
Penerimaan atas aset keuangan yang telah hapusbukukan	83.612.240	171.943.539
Pendapatan operasional lainnya	735.947.949	472.935.285
Pembayaran beban bunga	(8.446.213.768)	(3.489.450.256)
Beban gaji dan tunjangan	(9.042.545.507)	(3.167.775.403)
Beban umum dan administrasi	(2.709.775.855)	(1.231.535.127)
Pendapatan non operasional lainnya	499.620.488	96.847.807
Beban non operasional lainnya	(166.746.025)	(86.570.538)
Pembayaran pajak penghasilan	(849.758.512)	(215.658.782)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(3.705.129.100)	1.748.464.388
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1.505.866.704	3.450.157.780
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:		
Penempatan pada bank lain	(53.539.484.623)	11.200.634.759)
Kredit yang diberikan	(68.885.265.680)	(26.221.101.902)
Agunan yang diambil alih	(1.688.723.023)	(97.916.667)
Aset lain-lain	(3.838.472.914)	(687.894.665)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Penurunan/(kenaikan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	385.191.035	312.471.091
Simpanan	90.513.811.459	13.234.404.323
Simpanan dari bank lain	2.750.000.000	500.000.000
Liabilitas imbalan kerja	123.491.757	101.895.359
Liabilitas lain-lain	1.170.857.775	3.712.853
Kas bersih diperoleh dari untuk aktivitas operasi	(31.502.727.510)	1.796.362.931
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(2.419.342.941)	(1.140.040.031)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.419.342.941)	(1.140.040.031)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2025	2024
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	37.880.441.851	4.000.000.000
Saldo laba dibagikan	(4.000.000.000)	(4.498.000.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	30.133.213.101	(498.000.000)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	(41.628.600)	158.322.900
Kas dan setara kas pada awal tahun	402.863.300	244.540.400
Kas dan setara kas pada akhir tahun	361.234.700	402.863.300

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

1. U M U M

PT BPR Artha Sarana Abadi sebelumnya bernama PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari (D/H PT BPR Adyacikarang Sempana) didirikan berdasarkan akte Nomor 44 tanggal 20 Maret 1992 dari Notaris Sri Rahayu. S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-5505 HT.01.01.1992 tanggal 9 Juli 1992. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir Akte No 11 tanggal 12 September 2025 dengan notaris Rosliana S.H yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0337877 Tahun 2025 tanggal 15 September 2025. BPR telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP: 0015-0964-9843-2000.

Kegiatan utama PT BPR Artha Sarana Abadi adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan serta memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. PT BPR Artha Sarana Abadi berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Sentraniaga Kalimalang Blok A1 No. 3A-5 dan Blok B2 No. 8 Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17144. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 93 dan 32 orang.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT BPR Artha Sarana Abadi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: Farai Tody	Farai Tody
Komisaris	: Drs. Syarifuddin HM	Drs. Syarifuddin HM
Dewan Direksi		
Direktur Utama	: Soebroto Gondo	Soebroto Gondo
Direktur	: Siti Muhayatun	Siti Muhayatun

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan BPR telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) dan mencerminkan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam SAK EP. Tahun buku ini merupakan periode penerapan pertama kali SAK EP oleh BPR.

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan BPR disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EP ini merupakan penerapan pertama kali oleh BPR.

Sebelum penerapan SAK EP, Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar lain sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

b. Instrumen Keuangan

Aset keuangan adalah kas, piutang, atau instrumen kontraktual yang memberikan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain.

Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

1) Aset keuangan diklasifikasikan sebagai:

- a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal.
- b. Piutang usaha dan pinjaman yang diberikan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada)
- c. Investasi jangka pendek/efek yang diperdagangkan diukur pada nilai wajar jika dapat ditentukan dengan andal.

2) Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai:

- a. Utang usaha dan utang lain-lain diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.
- b. Pinjaman bank dan utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. **DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**
(Lanjutan)

b. **Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan.

Pengukuran Awal

Mensyaratkan model biaya perolehan diamortisasi untuk seluruh instrumen keuangan dasar. Pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

- 1) Aset dan liabilitas keuangan dasar: diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.
- 2) Investasi ekuitas publik : nilai wajar dapat diukur secara andal.
- 3) Instrumen kompleks (derivatif, sekuritisasi): mengukur seluruh instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar di laba rugi.
- 4) Ekuitas yang tidak diperdagangkan secara publik dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai

Penurunan Nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, entitas langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:

- 1) Kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
- 2) Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
- 3) Kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan, karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
- 4) Terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- 5) Data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (Lanjutan)

Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.

Penghentian Pengakuan

1) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika salah satu dari:

- a. Hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan kedaluwarsa atau diselesaikan
- b. Entitas mengalihkan kepada pihak lain secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan, atau

2) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) hanya ketika liabilitas tersebut berakhir yaitu:

- a) Ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.
- b) Jika peminjam dan pemberi pinjaman mengganti instrumen keuangan dengan syarat yang berbeda secara substansial, maka entitas peminjam dan pemberi pinjaman mencatat transaksi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
- c) Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihapuskan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi pihak berelasi sebagaimana diatur SAK EP Bab 33 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas yang menyusun laporan keuangannya (entitas pelapor):

- a) orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - iii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

- b) suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi imbalan para pekerja entitas pelapor maupun imbalan pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
 - viii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak berelasi diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima.

BPR menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan, sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%
Macet	100%

e. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan CKPN kredit dan provisi kredit.

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

BPR wajib menetapkan Kualitas Aset Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset produktif terhadap beberapa rekening aktiva 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset dibentuk berdasarkan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penggolongan Aset Produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Penghitungan kewajiban penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh BPR sesuai dengan ketentuan POJK No 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

PPKA Umum

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Lancar : 0,5%

PPKA Khusus

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus : 3%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar : 10%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Diragukan : 50%
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Macet : 100%

Pembentukan PPKA dengan klasifikasi lancar dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA ditetapkan paling tinggi sebesar:

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

<u>Persentase</u>	<u>Keterangan</u>
100%	Dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
85%	Dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
80%	Dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
70%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan sampai 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
60%	Dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
50%	Dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.
50%	Dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.
50%	Dari nilai hipotik atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan yang telah dilakukan pengikatan hipotik atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (Lanjutan)

50%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
50%	Untuk bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
30%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
20%	Dari nilai agunan yang dinilai satu tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur dalam standar penilaian yang berlaku.

Agunan selain yang dimaksud di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa kendaraan bermotor:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Aktiva produktif dihapusbukukan pada saat manajemen menyatakan bahwa Aktiva Produktif tersebut tidak mungkin tertagih. Penerimaan kembali Aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya dalam tahun berjalan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. **DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**
(Lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. PT BPR Artha Sarana Abadi melakukan perhitungan CKPN Menggunakan pendekatan metode statistik dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu :

- a. *Probability of Default (PD)* yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur gagal memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis, Roll Rates*, atau metode lainnya.
- b. *Loss Given Default (LGD)* yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan antara lain *Expected Recoveries, Collateral Shortfall*, atau metode lainnya.

Salah satu komponen yang dibentuk dalam perhitungan CKPN adalah dengan menggunakan pendekatan *Probability Of Default (PD)*, dimana perhitungan dengan metode *Probability of Default (PD)*, PT BPR Artha Sarana Abadi menggunakan *Migration Analysis*.

Pendekatan perhitungan *Probability Of Default (PD)* dengan *Migration Analysis* ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit berdasarkan kualitas kredit yang lebih buruk dari tahun ke tahun dengan tren per triwulan. Langkah perhitungan dilakukan dengan tahapan evaluasi penurunan nilai sebagai berikut :

- Setiap debitur dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap kondisi setiap triwulan terhadap kondisi ketepatan pembayaran kewajiban kepada pihak BPR.
- Setiap agunan debitur dilakukan evaluasi terhadap *recovery* yang akan diperoleh untuk menutup pembayaran debitur.
- Dilakukan evaluasi terhadap garansi dari pihak lain jika ada komitmen yang bisa direalisasikan untuk menutup potensi risiko ke depan.
- Evaluasi terhadap prospek usaha debitur dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal.
- Setiap debitur yang mulai menunggak dilakukan pembinaan dan penagihan oleh petugas yang ditunjuk oleh BPR.
- Mengupayakan pencegahan melalui pemberian surat tagihan dan/atau kunjungan ke debitur maupun melakukan penilaian kembali terhadap agunan.
- BPR melakukan *Validasi/Clasing* agar dipastikan kebenaran data dan bersih. Sehingga dasar perhitungan menjadi valid
- BPR melakukan evaluasi penurunan nilai secara *Individual* dan *Kolektif*

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai *PD*, *LGD*, dan outstanding kredit (*exposure at default/EAD*) :

Probability of Default (PD) x Loss Given Default (LGD) x Exposure at Default (EAD)

Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

f. Kebijakan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.

Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang masih memenuhi kewajibannya setelah kredit di restrukturisasi. Cara Restrukturisasinya yaitu :

1. Modifikasi persyaratan kredit: penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan.
2. Penambahan fasilitas kredit: *fresh money* atau konversi tunggakan bunga.

g. Agunan yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih atau AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

g. Agunan yang Diambil Alih (Lanjutan)

agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR (*debt to asset swap*).

Penyelesaian kredit terkait agunan :

1. Penyerahan agunan sebagai penyelesaian kredit. Pengambilalihan agunan merupakan penyelesaian kredit. AYDA dicatat hanya yang berasal dari penyelesaian kredit.
2. Penjualan agunan (bersama atau dengan persetujuan debitur) untuk melunasi kewajiban debitur. Pengambilalihan agunan merupakan bagian dari proses penyelesaian kredit.

Pengambilalihan Agunan:

1. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR tidak mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur tidak membayar kekurangannya maka perjanjian kredit selesai dan kemudian dicatat sebagai AYDA.
2. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur membayar kekurangannya maka perjanjian kredit belum selesai dan kemudian dicatat dalam Rekening Administratif.

h. Aset Tetap

Aset tetap dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991 (Pasal 1), kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ke-13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan, pengelompokan aset tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan NO.138/KMK-03/2002, dan aset tetap dan inventaris kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan. Sesuai dengan Surat Edaran nomor 138/SE-DIR/BPR-MK/AK/I/2016 per tanggal 8 Januari 2016, apabila aset tetap harga perolehannya Rp 1.000.000,- atau lebih maka wajib dilakukan penyusutannya. Persentase penyusutan atau amortisasi sebagai berikut:

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Kelompok Harta Berwujud	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif penyusutan (Per Tahun)
I. Bukan Bangunan		
- Kelompok 1	4	25%
- Kelompok 2	8	12,50%
- Kelompok 3	16	6,25%
- Kelompok 4	20	5%
II. Bangunan Permanen		
- Permanen	20	5%
- Tidak Permanen	10	10%

i. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

j. Simpanan

Tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

k. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

l. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian diperlakukan sebagai pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian diakui pada saat terjadinya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian namun terkait dengan jangka waktu, diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya.

m. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak Penghasilan Kini (*Current Tax*)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk periode berjalan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak kini diakui sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar atas laba kena pajak periode berjalan. Jika pembayaran pajak yang telah dilakukan melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisih tersebut diakui sebagai aset pajak kini. Kewajiban atau aset pajak kini dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada/diterima dari otoritas pajak, dengan menggunakan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, kecuali untuk *goodwill* yang tidak dapat dikurangkan pajak dan pengakuan awal aset/liabilitas dari transaksi non-bisnis.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

3. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar. Pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berasal dari transaksi yang langsung diakui ke ekuitas, maka dampaknya juga diakui langsung ke ekuitas.

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank yang berjangka waktu singkat.

o. Cadangan Umum

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, perusahaan wajib setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

p. Liabilitas Imbalan Kerja

Penghitungan liabilitas imbalan kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat Bab 28 tentang "Imbalan Kerja.". Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Perusahaan sudah melakukan persiapan (menghitung) Imbalan Pasca Kerja dengan cara mengikutsertakan karyawannya pada program pendanaan hari tua pada PT Asuransi Jiwa IFG.

q. Penggunaan Estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen BPR untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Disebabkan karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil akrual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

4. K A S

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Uang tunai	<u>361.234.700</u>	<u>402.863.300</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terhadap risiko kebongkaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp300.000.000, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pendapatan bunga yang akan diterima	<u>4.271.352.593</u>	<u>861.751.846</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2025	2024
	Rp	Rp
Giro pada bank lain :		
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	11.107.927.539	-
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	5.407.796.775	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	290.860.544	116.444.510
PT Bank Central Asia, Tbk	104.301.066	242.793.797
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	51.226.154	209.126.818
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	188.768.539	13.160.846
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	204.092.931	3.818.778.727
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	819.647.009	-
PT Bank KB Bukopin, Tbk	244.108.067	-
PT Bank Syariah Indonesia	1.990.068	-
PT Bank KB Bukopin, Tbk	2.230.000	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	985.000	-
PT Bank SMBC Indonesia, Tbk	2.000.000	-
 Jumlah giro pada bank lain	 <u>18.425.933.692</u>	 <u>4.400.304.697</u>
 Tabungan pada bank lain:		
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero). Tbk	991.748.208	1.427.822.708
PT Bank J Trust	1.175.348.590	460.030.522
PT BPR Lestari Bali	33.649.273	33.511.313
PT BPR Karyajatnika Sadaya	8.645.824	1.471.891
PT BPR Artharindo	207.977.097	82.671.633
PT BPR Utomo	357.290.985	-
PT BPR Koperindo	44.075.330	-
PT BPR Xen	50.000	-
PT BPR Intidana Sukses	578.389	-
 Jumlah tabungan pada bank lain	 <u>2.819.363.696</u>	 <u>2.005.508.066</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Deposito pada bank lain :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa :		
PT BPR Artha Karya Sejahtera	2.250.000.000	-
Pihak ketiga :		
Deposito berjangka – BPR	29.500.000.000	1.500.000.000
Deposito berjangka – Bank Umum	19.500.000.000	11.050.000.000
	<u>51.250.000.000</u>	<u>12.550.000.000</u>
Jumlah deposito		
	<u>51.250.000.000</u>	<u>12.550.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	<u>72.495.297.385</u>	<u>18.955.812.764</u>
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(177.840.054)</u>	<u>(14.093.894)</u>
Jumlah	<u>72.317.457.331</u>	<u>18.941.718.870</u>

Tingkat suku bunga rata-rata deposito pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 3,5% dan 7,5%. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	14.093.894	26.263.639
Penyisihan kerugian tahun berjalan	205.157.353	7.324.497
Penyesuaian	(41.411.193)	(19.494.242)
Saldo akhir tahun	<u>177.840.054</u>	<u>14.093.894</u>

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis kredit

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Aksep	53.268.988.049	33.413.564.411
KKP	446.546.197	263.388.327
Bulanan	65.710.962.923	24.351.941.710
Konsumtif	34.775.538	99.484.041
Lain/Berjangka	500.000.000	500.000.000
Pensiunan	<u>7.534.653.319</u>	<u>-</u>
 Jumlah	 127.495.926.026	 58.628.378.489
Provisi kredit	(134.666.716)	(314.628.461)
Biaya transaksi	4.042.927	167.418.209
Pendapatan bunga restrukturisasi	<u>(1.240.938)</u>	<u>(2.372.618)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 <u>127.364.061.299</u>	 <u>58.478.795.620</u>
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.270.686.857)	-
Penyisihan kerugian		(397.036.125)
 Jumlah bersih	 <u>126.093.374.442</u>	 <u>58.081.759.495</u>

b. Berdasarkan keterkaitan

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Terkait	446.546.197	101.027.216
Tidak terkait	<u>127.049.379.830</u>	<u>58.527.351.275</u>
 Jumlah	 127.495.926.027	 58.628.378.489
Provisi kredit	(134.666.716)	(314.628.461)
Biaya transaksi	4.042.927	167.418.209
Pendapatan bunga restrukturisasi	<u>(1.240.938)</u>	<u>(2.372.618)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 <u>127.364.061.300</u>	 <u>58.478.795.620</u>
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.270.686.857)	-
Penyisihan kerugian	-	(397.036.125)
 Jumlah bersih	 <u>126.093.374.442</u>	 <u>58.081.759.495</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Lancar	114.347.698.667	53.642.136.804
Dalam perhatian khusus	10.872.915.840	2.870.022.740
Kurang lancar	1.105.551.505	673.421.219
Diragukan	457.863.047	-
Macet	711.896.968	1.442.797.728
	<u>127.495.926.027</u>	<u>58.628.378.489</u>
Jumlah	127.495.926.027	58.628.378.489
Provisi kredit	(134.666.716)	(314.628.461)
Biaya transaksi	4.042.927	167.418.209
Pendapatan bunga restrukturisasi	(1.240.938)	(2.372.618)
	<u>127.364.061.300</u>	<u>58.478.795.620</u>
Jumlah kredit yang diberikan	127.364.061.300	58.478.795.620
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.270.686.857)	-
Penyisihan kerugian	-	(397.036.125)
	<u>126.093.374.442</u>	<u>58.081.759.495</u>
Jumlah bersih	126.093.374.442	58.081.759.495

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	%	%
NPL Gross	1,78	3,61
NPL Net	1,17	2,93

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2025 Rp	2024 Rp
Saldo awal tahun	397.036.125	392.272.899
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	1.119.953.496	4.763.226
Pemulihan selama tahun berjalan	(287.710.459)	-
Penyesuaian	41.407.695	-
Saldo akhir tahun	<u>1.270.686.857</u>	<u>397.036.125</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

e. Kredit yang direstrukturisasi

Pada tahun 2025 jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp 16.097.043.822, jenis restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 446.546.197 dan Rp 101.027.216
- b. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebesar 3% - 26% (2025).
- c. Pendapatan bunga selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 25.106.854.794 dan Rp 9.150.956.867 (lihat Catatan 21).
- d. Kredit yang diberikan diasuransikan dengan asuransi jiwa kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Bank Indonesia, sebagai berikut :

	2025 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.575.244.300
Pihak ketiga	3.150.488.600

Pada tanggal 31 Desember 2025 tidak ada pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Tanah, Bangunan, dan Kendaraan	<u>3.331.188.138</u>	<u>1.642.465.115</u>

9. ASET TETAP

	2 0 2 5			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	232.500.000	-	-	232.500.000
Bangunan	642.500.000	-	-	642.500.000
Kendaraan	1.214.250.000	1.478.777.920	-	2.693.027.920
Inventaris kantor	265.865.416	940.565.021	-	1.206.430.437
Jumlah	<u>2.355.115.416</u>	<u>2.419.342.941</u>	<u>-</u>	<u>4.774.458.357</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	388.177.083	32.125.000	-	420.302.083
Kendaraan	500.059.373	214.070.140	-	714.129.513
Inventaris kantor	142.023.511	160.679.745	-	302.703.256
Jumlah	<u>1.030.259.967</u>	<u>406.874.885</u>	<u>-</u>	<u>1.437.134.852</u>
Nilai buku	<u>1.324.855.449</u>			<u>3.337.323.505</u>

	2 0 2 4			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	232.500.000	-	-	232.500.000
Bangunan	642.500.000	-	-	642.500.000
Kendaraan	513.550.000	700.700.000	-	1.214.250.000
Inventaris kantor	158.963.580	123.180.836	16.279.000	265.865.416
Jumlah	<u>1.547.513.580</u>	<u>823.880.836</u>	<u>16.279.000</u>	<u>2.355.115.416</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	356.052.083	32.125.000	-	388.177.083
Kendaraan	412.424.998	87.634.375	-	500.059.373
Inventaris kantor	135.557.986	22.744.525	16.279.000	142.023.511
Jumlah	<u>904.035.067</u>	<u>142.503.900</u>	<u>16.279.000</u>	<u>1.030.259.967</u>
Nilai buku	<u>643.478.513</u>			<u>1.324.855.449</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

9. **ASET TETAP (Lanjutan)**

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp406.874.885 untuk tahun 2025 dan Rp142.503.900 untuk tahun 2024. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

10. **ASET TIDAK BERWUJUD**

	2025 Rp	2024 Rp
Software	55.000.000	55.000.000
Akumulasi amortisasi	(55.000.000)	(55.000.000)
Jumlah	<u>—</u>	<u>—</u>

11. **ASET LAIN-LAIN**

	2025 Rp	2024 Rp
Renovasi dan uang muka	4.129.670.984	852.811.893
Sewa	310.000.000	—
Piutang kepada asuransi	801.128.356	565.825.407
Persediaan atk dan barang cetakan	27.169.384	10.858.511
Jumlah	<u>5.267.968.724</u>	<u>1.429.495.811</u>

12. **LIABILITAS SEGERA**

	2025 Rp	2024 Rp
PPh pasal 4 ayat 2	133.309.202	63.682.273
PPh pasal 23	64.000	—
Titipan nasabah	825.309.055	495.208.949
PPh pasal 21	—	14.600.000
Jumlah	<u>958.682.257</u>	<u>573.491.222</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

14. **SIMPANAN (Lanjutan)**

Simpanan berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Tabungan :		
Pihak berelasi	402.316.661	-
Pihak ketiga	7.282.756.949	5.821.079.369
Jumlah	<u>7.685.073.610</u>	<u>5.821.079.369</u>
Deposito berjangka :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	102.649.449.880	47.795.356.398
Pihak ketiga	45.824.680.720	12.028.956.984
Jumlah	<u>148.474.130.600</u>	<u>59.824.313.382</u>
Jumlah simpanan	<u>156.159.204.210</u>	<u>65.645.392.751</u>

15. **SIMPANAN DARI BANK LAIN**

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
PT BPR Gamon	1.750.000.000	-
PT BPR Lestari Banten	1.500.000.000	-
PT BPR Mitra Telagasari Utama	500.000.000	-
PT BPR Cahaya Wiraputra	-	500.000.000
PT BPR Telaga Sari Utama	-	500.000.000
Jumlah	<u>3.750.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan perpanjangan otomatis.

Tingkat suku bunga deposito dari bank lain berkisar antara 6.00% sampai dengan 6.75% (2025) per tahun.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2025	2024
	Rp	Rp
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk	14.771.763.218	-
PT Bank CIMB Niaga Internasional, Tbk	5.400.000.000	-
PT Bank KB Indonesia Internasional, Tbk	1.947.199.846	-
PT BPR Karya Jatnika Sadaya	2.258.643.967	1.952.132.267
PT BPR Utomo	6.031.532.160	-
PT BPR Daya Lumbang Asia	2.250.243.284	-
PT BPR Xen	2.378.045.716	-
Pinjaman Kendaraan	1.242.470.405	194.553.228
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	36.279.898.596	2.146.685.495
Provisi pinjaman	-	-
Biaya transaksi	-	-
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	<u>36.279.898.596</u>	<u>2.146.685.495</u>

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 27 tanggal 15 Mei 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000.000, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

PT Bank KB Indonesia Internasional, Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 102 tanggal 19 September 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank KB Indonesia Internasional, Tbk. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp20.000.000.000, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

PT BPR Daya Lumbang Asia

Berdasarkan perjanjian kredit No. 112 tanggal 21 Februari 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT BPR Daya Lumbang Asia. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.

PT BPR Karya Jatnika Sadaya

Berdasarkan perjanjian kredit No. KABL-B-SME/KS/25-07/65901977 tanggal 25 Juli 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT BPR Karya Jatnika Sadaya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. **PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)**

PT BPR Xen

Berdasarkan perjanjian kredit No.07 tanggal 17 Oktober 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman dari PT BPR Xen. Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp2.500.000.000, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 16 September 2025, BPR memperoleh pinjaman pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance untuk pembelian kendaraan operasional dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.

17. **PERPAJAKAN**

a. **Taksiran perhitungan pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dimuat dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>4.320.954.183</u>	<u>1.381.447.587</u>
Perbedaan waktu :		
Liabilitas imbalan kerja	123.491.757	-
Perbedaan tetap :		
Penghasilan yang dikenakan pajak final		
Jasa giro	(242.770.497)	(95.516.718)
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Jasa lingkungan	22.866.000	4.825.000
Suka duka	23.287.500	-
Sanksi/denda	544.440	3.502.844
Jumlah perbedaan tetap	<u>(196.072.557)</u>	<u>(87.188.874)</u>
Laba fiskal	<u>4.248.373.384</u>	<u>1.294.258.714</u>
Taksiran Pajak penghasilan badan	<u>849.758.512</u>	<u>215.658.782</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025, dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. **PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. **Utang pajak**

	2025 Rp	2024 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	849.758.512	215.658.782
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	<u>(78.022.817)</u>	<u>(20.440.746)</u>
Pajak Penghasilan pasal 29	<u>771.735.695</u>	<u>195.218.036</u>

c. **Pajak Tangguhan**

Perhitungan jumlah pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2025		
	1 Januari 2025 Rp	Dikreditkan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Rp	31 Desember 2025 Rp
Aset pajak tangguhan:			
Imbalan Pasca kerja	-	80.235.029	80.235.029
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>-</u>	<u>80.235.029</u>	<u>80.235.029</u>

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dan dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang.

d. **Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

18. **LIABILITAS LAIN-LAIN**

	2025 Rp	2024 Rp
Cadangan bonus	400.000.000	-
Audit	22.600.000	-
Cadangan biaya pendidikan	-	3.712.853
Jumlah	<u>422.600.000</u>	<u>3.712.853</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta SAK EP Bab 28 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk mengakui Liabilitas Imbalan Kerja untuk karyawan memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan tersebut. Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas besarnya Liabilitas Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan.

Berikut ini adalah mutasi liabilitas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Saldo awal tahun lalu	605.917.594	504.022.235
Penambahan	123.491.757	101.895.359
Pengurangan	-	-
Saldo pada akhir tahun	<u>729.409.351</u>	<u>605.917.594</u>

BPR telah mengikutsertakan karyawannya pada program pendanaan hari tua pada PT Asuransi Jiwa IFG. Jumlah premi asuransi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program tersebut adalah sebesar Rp729.409.351.

20. MODAL SAHAM

Berdasarkan Persetujuan OJK tentang Penambahan Modal Disetor PT BPR Artha Sarana Abadi pada tanggal 19 Februari 2025, Komposisi kepemilikan modal BPR menjadi sebagai berikut :

	2 0 2 5	
Pemegang saham	Persentase kepemilikan %	Jumlah Rp
Farai Tody	99,99	9.999.000.000
Farrel Prema Tody	0,01	1.000.000
Jumlah	<u>100</u>	<u>10.000.000.000</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

21. PENDAPATAN BUNGA

	2025 Rp	2024 Rp
Penempatan pada bank lain :		
Deposito	1.487.093.861	1.212.846.801
Tabungan	114.509.248	92.978.047
Giro	128.261.249	2.538.670
Jumlah	<u>1.729.864.358</u>	<u>1.308.363.519</u>
Pihak Ketiga bukan bank		
Pendapatan bunga KYD	<u>21.608.894.926</u>	<u>7.011.743.790</u>
Jumlah pendapatan bunga	<u>23.338.759.284</u>	<u>8.320.107.309</u>
Pendapatan provisi – Provisi kredit :		
Bunga dari provisi kredit	2.042.820.792	846.451.349
Bunga dari biaya transaksi	<u>(274.725.282)</u>	<u>(15.601.791)</u>
Jumlah pendapatan provisi	<u>1.768.095.510</u>	<u>830.849.558</u>
Jumlah	<u>25.106.854.794</u>	<u>9.150.956.867</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

22. BEBAN BUNGA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Bunga bank lain :		
Bunga simpanan dari bank lain	98.221.510	34.405.250
Bunga pinjaman yang diterima	1.805.699.301	-
Biaya transaksi kepada bank lain	226.416.647	-
Jumlah bunga bank lain	<u>2.130.337.458</u>	<u>34.405.250</u>
Simpanan :		
Deposito berjangka	5.992.537.486	3.247.904.015
Tabungan	143.127.523	73.246.007
Jumlah bunga simpanan	<u>6.135.665.009</u>	<u>3.321.150.022</u>
Bunga lainnya	<u>180.211.301</u>	<u>133.894.984</u>
Jumlah	<u>8.446.213.768</u>	<u>3.489.450.256</u>

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif	287.710.459	30.590.277
Administrasi pembatalan	138.795.527	68.598.899
Penerimaan kredit hapus buku	83.612.240	171.943.539
Denda kredit	59.253.055	197.471.011
Penutupan rekening	51.776.547	49.391.738
Lainnya	198.412.361	126.883.360
Jumlah	<u>819.560.189</u>	<u>644.878.824</u>

24. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN DAN PENYUSUTAN

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Penyusutan	406.874.884	142.503.900
Lisensi	7.814.400	4.950.267
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	1.119.953.496	381.125.924
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	205.157.353	7.324.497
Jumlah	<u>1.739.800.133</u>	<u>535.904.588</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

25. BEBAN TENAGA KERJA

	2025 Rp	2024 Rp
Gaji dan upah	6.967.223.665	2.284.796.015
Honorarium	421.884.000	373.221.000
THR, bonus dan lainnya	1.000.215.462	423.966.569
Pendidikan dan pelatihan	653.222.380	85.791.819
Jumlah	<u>9.042.545.507</u>	<u>3.167.775.403</u>

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025 Rp	2024 Rp
Asuransi	692.481.378	194.706.504
Sewa	309.999.996	-
Bensin dan transport	303.343.452	449.509.525
Pemeliharaan dan perbaikan	209.140.531	179.304.250
Tol dan parkir	202.716.922	47.034.100
Iklan dan promosi	131.256.998	36.679.383
Barang dan jasa lainnya	128.762.579	14.632.300
Makan dan Minum	122.518.767	13.973.400
Notaris	96.375.549	21.750.000
Listrik	91.434.767	33.360.214
Cetakan	62.515.668	6.741.471
Telepon	54.449.117	25.960.893
Alat tulis kantor	52.164.858	25.021.389
Perlengkapan kantor	32.913.001	24.784.927
Pajak	22.136.163	89.841.000
Audit/konsultan	18.883.333	16.650.000
Materai	14.848.500	5.578.000
PAM	10.410.800	2.860.000
Koran dan majalah	5.000.000	2.700.000
Pengiriman dokumen	3.266.700	1.822.500
Lainnya	145.156.776	38.625.271
Jumlah	<u>2.709.775.855</u>	<u>1.231.535.127</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

27. PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Pendapatan penjualan asset	-	1.195.000
Pendapatan AYDA	301.358.772	95.652.807
Lainnya	198.261.716	-
Jumlah	<u>499.620.488</u>	<u>96.847.807</u>

BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Kerugian AYDA	96.231.195	56.510.000
Jasa lingkungan	22.866.000	4.825.000
Suka duka	23.287.500	10.196.253
Denda	544.440	3.502.844
Lainnya	23.816.890	11.536.441
Jumlah	<u>166.746.025</u>	<u>86.570.538</u>

28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Bunga Kredit Dalam Penyelesaian	2.955.078.519	3.148.247.695
Kontijensi	9.789.643.499	10.188.753.278
Jumlah	<u>12.744.722.018</u>	<u>13.337.000.973</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Pihak yang berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang berelasi, transaksi tersebut meliputi :

- a. BPR menempatkan dananya kepada pihak berelasi dalam bentuk deposito. Pada tanggal 31 Desember 2025 saldo deposito kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp2.250.000.000 (lihat Catatan 6).
- b. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp446.546.197 dan Rp101.027.216.
- c. Deposito berjangka dari pihak berelasi Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp102.649.449.880 dan Rp47.795.356.398. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo tabungan dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp402.316.661 dan Rp 0.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah Penyimpanan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Dalam hal diperlukan, LPS dapat menetapkan tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan. LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perekonomian Rakyat periode 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026 adalah sebesar 6%. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan yang dibayar selama tahun 2025 sebesar Rp180.211.301

31. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 12%. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. masing-masing sebesar 23% dan 24,45% .

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

31. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

	2025 Rp	2024 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)		
1. ASET NERACA		
1.1. Kas	-	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan	-	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	22.500.000	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	14.463.491.000	3.788.343.774
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	35.348.789.000	-
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-	-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	3.771.145.000	-
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	-	-
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	489.125.000	-
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	65.512.000	-
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	459.123.000	40.805.535.000
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	198.388.000	-
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	3.337.323.000	1.324.855.449
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	2.191.771.000	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	8.136.770.000	2.291.248.000
Jumlah ATMR	68.483.937.000	48.209.982.223

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

31. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	10.000.000.000	6.000.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.1. Agio	-	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	-	4.000.000.000
1.1.2.3. Cadangan umum	1.200.000.000	1.200.000.000
1.1.2.4. Cadangan tujuan	-	-
1.1.2.5. Laba tahun-tahun lalu	913.560.000	541.743
1.1.2.6. Laba tahun berjalan	3.500.557.000	582.894.432
1.1.2.7. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	-	-
1.1.2.8. <i>Goodwill</i>	-	-
1.1.2.9. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1(satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	(433.412.000)	(596.369.765)
1.1.2.10. -/- Selisih kurang antara CKPN dan PPKA	-	-
Jumlah modal inti utama	<u>15.180.705.000</u>	<u>11.187.066.410</u>
1.2 Modal Inti Tambahan	-	-
1.3 Modal Inti Tambahan	<u>15.180.705.000</u>	<u>11.187.066.410</u>
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-	-
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1.25% dari ATMR)	571.738.000	602.624.778
Jumlah modal pelengkap	<u>571.738.000</u>	<u>602.624.778</u>
Jumlah modal	<u>15.752.443.000</u>	<u>11.789.691.188</u>
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	8.218.072.440	3.856.798.578
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	7.534.370.560	7.932.892.610
IV. Rasio Modal (CAR) (Jumlah modal / ATMR) x 100%	23,00	24,45
Persentase Modal Inti terhadap ATMR		
V. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah modal	1.575.244.300	-
Pihak ketiga : 20% x Jumlah modal	3.150.488.600	-

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

32. **INFORMASI LAINNYA**

	2 0 2 5	2 0 2 4
Rasio	%	%
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	23,00	24,45
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	0,80	2,29
<i>Non Performing Loan</i>	1,78	3,61
Pemenuhan PPAP	100	100
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	3,02	1,97
<i>Return On Equity (ROE)</i>	24,74	9,89
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	84,02	86,00
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Rasio (LDR)</i>	81,64	89,31
<i>Cash Rasio</i>	13,69	10,25

33. **MANAJEMEN RISIKO**

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas Perekonomian, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

33. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aktiva dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan (Catatan 26) adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu Perekonomian (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional bank secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direksi.
5. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK dan memberikan *Early Warning* kepada Direksi dimana terdapat kondisi telah mendekati limit BMPK.
6. Melakukan mitigasi risiko kredit dengan pihak asuransi.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

33. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi. BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai berikut :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

34. **PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi BPR sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

BPR Telah mempunyai kebijakan dan Prosedur pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang telah disahkan pada tanggal 13 Desember 2023.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

Laporan keuangan PT BPR Artha Sarana Abadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat (SAK Indonesia untuk Entitas Privat). Ini merupakan laporan keuangan tahunan pertama PT Artha Sarana Abadi yang disusun dengan menerapkan SAK EP.

Dalam mengadopsi SAK Entitas Privat pertama kali, Perusahaan menerapkan ketentuan berdasarkan Bab 35 SAK EP Tentang Ketentuan Transisi SAK Entitas Privat. Tanggal transisi Perusahaan adalah 1 Januari 2025. Perusahaan telah menyusun saldo awal SAK Entitas Privat pada tanggal transisi tersebut dengan:

- 1 Mengakui semua aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh SAK Entitas Privat;
- 2 Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau liabilitas jika SAK Entitas Privat tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- 3 Melakukan reklasifikasi pos-pos yang diakui berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya (SAK - ETAP) namun memiliki tipe yang berbeda berdasarkan SAK EP;
- 4 Menerapkan SAK Entitas Privat dalam mengukur semua aset dan liabilitas yang diakui.

Adopsi SAK EP ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan andal mengenai posisi keuangan Perusahaan. Perubahan signifikan yang memengaruhi laporan keuangan Perusahaan meliputi:

- 1 Pajak Penghasilan (Pajak Tanggahan)
Berbeda dengan SAK ETAP yang hanya mengakui beban pajak kini, SAK EP mensyaratkan Perusahaan untuk mengakui aset dan liabilitas pajak tanggahan atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset/liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya.
- 2 Instrumen Keuangan
Perusahaan kini mengklasifikasikan dan mengukur instrumen keuangan sesuai dengan prinsip SAK EP, termasuk penilaian penurunan nilai aset keuangan berdasarkan bukti objektif yang lebih komprehensif.
- 3 Penyajian Laporan Keuangan
Perusahaan telah melakukan reklasifikasi dan penyesuaian penyajian pada beberapa pos neraca dan laba rugi untuk mematuhi format yang disyaratkan oleh SAK EP.

Sesuai dengan SAK EP, estimasi PT Artha Sarana Abadi pada tanggal transisi (1 Januari 2025) dan pada tanggal 31 Desember 2025 konsisten dengan estimasi yang dibuat untuk tanggal yang sama berdasarkan SAK ETAP (setelah penyesuaian untuk mencerminkan perbedaan dalam kebijakan akuntansi), kecuali jika terdapat bukti objektif bahwa estimasi tersebut keliru.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SARANA ABADI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP)**
(Lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2025, Entitas mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan SAK EP ini menggantikan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Sebagai bagian dari transisi ke SAK EP, Entitas telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap dampak perubahan tersebut terhadap laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi ini mencakup, antara lain, pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan.

Dampak Penerapan SAK EP:

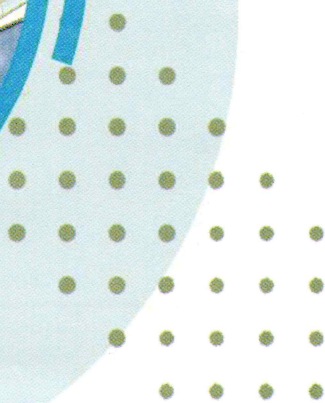
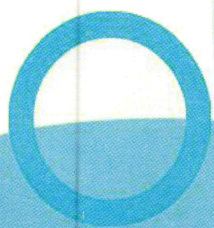
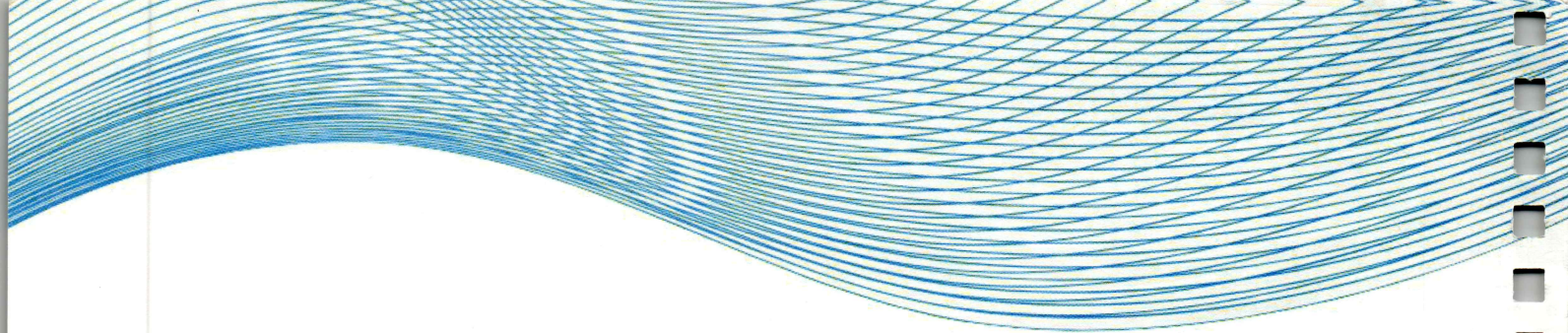
Entitas telah menilai bahwa penerapan SAK EP akan berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan, antara lain:

- **Pengakuan Pendapatan:** Sesuai dengan ketentuan dalam SAK EP, pengakuan pendapatan untuk beberapa transaksi akan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan pada periode sebelumnya.
- **Pengukuran Aset dan Kewajiban:** Beberapa aset dan kewajiban akan diukur dengan dasar yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat dari aset tetap dan kewajiban jangka panjang.
- **Pengungkapan Informasi:** SAK EP mengharuskan pengungkapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan SAK ETAP yang berlaku sebelumnya, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Entitas telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SAK EP dilakukan dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi standar ini terhadap laporan keuangan entitas di masa mendatang.

36. **TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada 24 Februari 2026.



PT Bank Perekonomian Rakyat
Artha Sarana Abadi
Management Letter
atas
Audit Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2025

PT BPR Artha Sarana Abadi

Nomor : 100/BPRASA/ML/II /2026

Perihal : Managemen letter

Bandung, 24 Februari 2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Artha Sarana Abadi
Bekasi

RAHASIA

Dengan hormat,

Dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan PT BPR Artha Sarana Abadi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kami juga telah melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern serta sistem operasional prosedur, sejauh yang kami pandang perlu untuk menetapkan dasar kepercayaan kami atas masalah tersebut guna menentukan sifat, saat, dan luasnya pemeriksaan yang dilakukan.

Penelaahan kami atas struktur pengendalian intern tidak mencakup pengujian dan penelitian secara mendalam dan tidak ditujukan untuk melakukan penilaian atas struktur pengendalian intern yang memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan penyimpangan. Dengan adanya keterbatasan yang melekat pada hal di atas, kesalahan atau penyimpangan mungkin saja terjadi dan tidak terdeteksi. Selain itu dalam setiap penilaian atas struktur pengendalian intern terdapat risiko bahwa penilaian tersebut menjadi kurang memadai, karena adanya perubahan kondisi atau penyimpangan dalam efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelaahan struktur pengendalian intern, serta sistem operasional dan prosedur, terlampir kami sampaikan usulan untuk lebih meningkatkan tercapainya sistem pengendalian intern serta sistem operasional dan prosedur yang lebih memadai.

Surat ini kami sampaikan untuk keperluan manajemen semata-mata untuk memperoleh perhatian seperlunya. Sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, kami bersedia untuk mendiskusikannya setiap waktu.



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

1. Kredit Yang Diberikan

Temuan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kredit yang diberikan per 31 Desember 2025, kami menemukan bahwa terdapat pencairan kredit sebesar Rp 1.081.414.552 dengan kualitas non lancar, yang berasal dari pencairan kredit pada tahun yang sama yaitu tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Nama	Tanggal pencairan	Plafond	Baki debit	Kualitas
2502501003	Asep Tanzilul Farhi	2025/01/14	Rp 500.000.000	Rp 478.625.104	KL
2502502012	Danny Kurnia	2025/02/19	475.000.000	457.863.047	D
1901802003ADD1	Muhtada Sobirin	2025/04/28	150.000.000	144.926.401	KL

Kriteria :

POJK Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset
Bank Perekonomian Rakyat
BAB 11 Cakupan KPB
Huruf A kebijakan Pokok dalam Perkreditan
Nomor 1 Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit

- 1) Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling sedikit mencakup
 - a) Prosedur dan kewenangan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis kredit, prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, serta prosedur pengawasan kredit.
 - b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus.
 - c) Prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit

Rekomendasi :

Kami mengusulkan agar BPR lebih berhati-hati dalam pencairan kredit dan melakukan Analisa dengan detail.

Tanggapan Manajemen :

Manajemen menerima temuan tersebut dan berkomitmen untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit. Ke depan analisis kredit akan dilakukan secara lebih cermat sebelum pencairan, serta pengawasan pasca pencairan akan diperkuat guna menjaga kualitas kredit.

PT BPR Artha Sarana Abadi